

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Ull Press. Yogyakarta.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum. Cet.2*. Kencana. Jakarta.
- Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.
- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.
- H. Bachrudin. 2021. *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat umum dan Warga Negara*. Thema Publishing. Yogyakarta.
- H.D. Stout. 1994. *de Betekenissen van de Wet. Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het Principe van Wetmatigheid van Bestuur*. W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle.
- Habib Adjie. 2015. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Cet.2*. PT Refika Aditama. Bandung.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cet.2*. PT Refika Aditama. Bandung.
- , 2018. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Cet.5*. PT Refika Aditama. Bandung.
- I Ketut Suardita. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Logemann, J.H.A. 1948. *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht*. Universite Pers. Leiden. Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego. *Tentang Teori suatu hukum tata negara positif*. Ichtar Baru-Van Hoeve. Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Edisi Pertama Cet.1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT.Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek Cet.6*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R. Wiyono. 2009. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Cet.2*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara. Cet.15*. PT Rajagrafindo Persada. Depok.
- Rusdianto Sesung, et al. 2017. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A. De. Rozaire (Anggota Ikatan Penerbit Indonesia). Surabaya.
- Shidqi Noer salsa. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*. Kencana. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Tatanusa. Jakarta.
- Victor Situmorang dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Rienaka Cipta. Jakarta.
- Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Ideas Publishing. Gorontalo.

## **JURNAL :**

Adheria Juniresta, Budi Santoso, dan Hanif Nur Widhiyanti. "Implikasi Yuridis Putusan Pailit Terhadap Jabatan Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". Jurnal Cakrawala Hukum. Fakultas Hukum Universitas Merdeka. Malang. Vol. 12. Nomor 1 April 2021.

Adriyanti, et.al. "Akibat hukum kepailitan Terhadap Individu yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No.74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst.jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011". Jurnal Notarisus. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 14. Nomor 1 2021.

Amanda Maylaksita. "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia". Lex Reinassance Journal. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. Vol. 4. Nomor 1 Januari Tahun 2019.

Fenny Sandra Lisa. 2019. "Sanksi Pemberhentian Sementara Notaris Pailit Yang Dinyatakan Dalam Proses Pailit". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.

Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto. "Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris". Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Jember. Vol. 8. Nomor 5 Tahun 2020.

M. Syahrul Borman. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Doktor Soetomo. Surabaya. Vol. 3. Nomor 1 Februari 2019.

Muhammad Amin Putra. "Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara". Jurnal Hukum Peratun, Puslitbang Hukum dan Peradilan. Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Vol. 3. Nomor 1. Februari 2020.

Nina Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu. "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara". Jurnal USM Law Review. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 4. Nomor 2 Tahun 2021

Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. Vol. 5. Nomor 4 Tahun 2016.

Sonyendah Retnaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 3. Nomor 1 Januari-Juni 2017.

Yeni Eka Sari dan Zulfikar Judge. 2021. "Akibat Hukum Notaris dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)". Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

#### **TESIS :**

Ardhita Pramudya. 2017. "*Penormaan Prinsip Debt Forgiveness Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 di Indonesia*". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Dyah Putri Purnamasari. 2022. "*Harmonisasi Hukum Antara Undang-Undang Jabatan Notaris Dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Terhadap Jabatan Notaris Yang Dinyatakan Pailit*". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang

Irfandy Aang Sularto. 2007. "*Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Akibat Dinyatakan Pailit*". Tesis. Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Karima. 2017. "*Makna Kepailitan Sebagai alasan pemberhentian jabatan Notaris*". Tesis. Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 96.

#### **ENSIKLOPEDIA :**

A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Pradnya Paramita. Jakarta.

## **INTERNET**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Diakses 8 Maret 2023 pukul 23.45 WITA.

Dhimas Ginanjar, 2020, "Majelis Pengawas Laporkan Notaris Devy Chrisnawati untuk Diberhentikan", Surat Kabar JawaPos.com, Edisi 27 Juli 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

*Burgerlijk Wetboek (BW).*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

*Wet Op het Notarisambt.*